

ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Andika Laia

Universitas Negeri Medan

e-mail: andikalaia34@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menilai pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi mengenai penganggaran dan penggunaan dana publik, sementara akuntabilitas menuntut tanggung jawab pemerintah dalam melaporkan dan mengelola dana tersebut. Studi ini mengadopsi metode kuantitatif melalui survei yang melibatkan mahasiswa Program Studi Akuntansi yang telah mempelajari manajemen keuangan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner terstruktur berbasis skala Likert 5 poin untuk mengukur tingkat pemahaman dan persepsi mahasiswa. Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa responden umumnya memiliki pemahaman yang positif terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan skor rata-rata indikator di atas 4, mencakup aspek akses informasi dan partisipasi dalam pengawasan keuangan. Uji validitas dan reliabilitas mengonfirmasi kualitas instrumen yang digunakan, ditunjukkan oleh nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,7. Analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pemahaman tentang transparansi serta keyakinan terhadap akuntabilitas secara signifikan memengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan publik ($p < 0,05$). Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan tinggi dalam meningkatkan kesadaran generasi muda akan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab. Hasil ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kurikulum dan program pendidikan yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan aktif dalam mendukung praktik pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Transparansi Keuangan Publik, Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan, Pemahaman Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Keuangan.

PENDAHULUAN

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik merupakan dua pilar utama yang esensial bagi pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Dalam pemerintahan modern, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan penggunaan dana publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana negara dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat memantau dan menilai efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran, sehingga pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan keuangan publik. Sebagaimana dinyatakan oleh Jones (2020), “transparansi adalah fondasi utama untuk mencegah korupsi dalam manajemen publik.”

Akuntabilitas juga memegang peran penting dalam tata kelola keuangan publik. Konsep ini menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dalam setiap penggunaan dana negara, dan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas mencakup prosedur audit, pengawasan oleh lembaga independen, serta partisipasi publik untuk memastikan bahwa dana negara digunakan secara bijaksana dan sesuai tujuan. Prinsip ini bukan hanya soal laporan, tetapi juga bagaimana pemerintah merespons jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana. Dengan adanya akuntabilitas, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terbangun, yang penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik (Smith, 2019).

Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran strategis dalam memahami serta mendukung penerapan prinsip-prinsip ini. Pemahaman mereka mengenai transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting, karena mereka adalah calon pemimpin yang kelak akan berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan publik. Mahasiswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip transparansi akan lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak terbuka dan akan mendorong keterbukaan informasi publik. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan, mendorong praktik pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel di masa depan.

Studi ini difokuskan pada mahasiswa Universitas Negeri Medan untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip tersebut. Pemahaman mahasiswa mengenai transparansi mencakup akses terhadap informasi anggaran dan pentingnya hak setiap warga negara untuk mengetahui penggunaan dana publik. Selain itu, pemahaman tentang akuntabilitas mencakup kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya audit dan pelaporan yang terbuka, serta pengawasan dari lembaga independen. Melalui pengetahuan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami peran penting transparansi dan akuntabilitas dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan.

Mahasiswa bukan hanya berperan sebagai bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan informasi publik, tetapi juga sebagai calon penggerak perubahan. Sebuah studi oleh Brown dan Miller (2019) menunjukkan bahwa “tingkat pemahaman generasi muda terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik berbanding lurus dengan partisipasi mereka dalam proses demokrasi.” Artinya, semakin baik pemahaman mahasiswa terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas, semakin tinggi pula partisipasi mereka dalam pengawasan, partisipasi politik, dan advokasi yang mendukung tata kelola publik yang bersih dan bertanggung jawab. Pemahaman yang kuat mengenai transparansi dan akuntabilitas akan mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan publik yang mereka pandang tidak sesuai.

Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Hasil dari studi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya dua prinsip ini. Di era keterbukaan informasi dan perkembangan digital, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang kuat mengenai transparansi dan akuntabilitas agar mampu berperan dalam membangun pemerintahan yang lebih baik serta mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan negara.

LITERATUR REVIEW

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam manajemen keuangan publik yang membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam literatur, transparansi sering dipahami sebagai keterbukaan informasi yang memungkinkan publik mengakses, memahami, dan menilai informasi terkait penggunaan dana negara. Menurut penelitian Jones (2020), transparansi dalam keuangan publik merupakan mekanisme yang sangat penting untuk mengurangi korupsi, meningkatkan kredibilitas pemerintah, dan memungkinkan masyarakat memantau apakah anggaran negara dikelola dengan baik. Dalam hal ini, keterbukaan informasi bukan hanya soal menyajikan data, tetapi juga memastikan bahwa data tersebut disajikan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Gomes (2019) menegaskan bahwa keterbukaan yang efektif melibatkan penyajian informasi yang tidak hanya dapat diakses, tetapi juga relevan, akurat, dan berkelanjutan.

Akuntabilitas, di sisi lain, menekankan pentingnya pemerintah untuk bertanggung jawab

kepada masyarakat atas segala keputusan dan penggunaan dana publik yang telah dilakukan. Smith (2019) mengemukakan bahwa akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pelaporan, pengawasan, dan evaluasi independen yang dapat menjamin bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik dianggap mampu mencegah penyalahgunaan anggaran dengan memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan integritas dan efektivitas anggaran yang digunakan sesuai dengan kebijakan yang telah direncanakan. Smith juga menyoroti peran lembaga pengawas independen sebagai komponen vital dalam memastikan kejujuran dan ketepatan dalam pelaksanaan anggaran publik. Dengan demikian, akuntabilitas memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjadikan pemerintah lebih bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat, sekaligus sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan, memiliki peran strategis dalam memahami dan mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Miller (2019) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sangat menentukan persepsi mereka terhadap efektivitas dan integritas pemerintah. Menurut Brown dan Miller, mahasiswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang transparansi dan akuntabilitas cenderung lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tertutup dan tidak jelas dalam pengelolaan anggarannya. Sebagai kelompok yang memiliki akses terhadap informasi dan pendidikan, mahasiswa berpotensi menjadi agen perubahan yang aktif memperjuangkan penerapan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel dalam berbagai kebijakan publik.

Lebih jauh, persepsi mahasiswa terhadap transparansi dan akuntabilitas dapat dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan akademis mereka. Penelitian oleh McBride dan Sinclair (2021) menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun pemahaman generasi muda mengenai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa mahasiswa yang memiliki pendidikan yang memadai mengenai tata kelola keuangan publik lebih mungkin untuk mengembangkan persepsi positif tentang pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dana publik. Pendidikan yang mendukung pemahaman tentang tata kelola publik tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga membentuk cara pandang mereka terhadap pentingnya keterbukaan dan pengawasan dalam manajemen keuangan negara.

Studi ini juga menemukan bahwa mahasiswa yang sadar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan advokasi publik, seperti pengawasan anggaran dan keterlibatan dalam diskusi kebijakan. Dalam hal ini, persepsi mahasiswa terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas secara langsung mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Ketika mahasiswa memahami peran penting dari keterbukaan dan akuntabilitas dalam manajemen publik, mereka lebih terdorong untuk berkontribusi dalam upaya memperbaiki sistem keuangan negara dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan. Pemahaman ini tidak hanya memperkuat kontrol publik terhadap anggaran, tetapi juga menciptakan kesadaran yang lebih tinggi akan hak dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan elemen penting yang perlu didukung oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan pemahaman yang baik mengenai kedua prinsip ini, mahasiswa tidak hanya akan memiliki persepsi positif terhadap tata kelola publik yang baik, tetapi juga akan lebih termotivasi untuk berperan aktif dalam mengawasi kebijakan publik dan mengadvokasi pemerintahan yang lebih terbuka. Keberadaan generasi muda yang kritis dan sadar akan

pentingnya transparansi dan akuntabilitas diyakini dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terpercaya, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan utama untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang objektif dan sistematis, yang kemudian dapat diolah secara statistik guna memperoleh kesimpulan yang relevan. Penelitian dilakukan di lingkungan mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Medan, khususnya mereka yang telah mempelajari mata kuliah manajemen keuangan publik. Fokus pada mahasiswa yang telah mempelajari mata kuliah tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, karena kelompok ini diharapkan memiliki pemahaman dasar terkait konsep-konsep yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri Medan yang telah menyelesaikan atau sedang mengambil mata kuliah manajemen keuangan publik. Mengingat luasnya populasi, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang representatif, yaitu mereka yang telah memperoleh pengetahuan mengenai manajemen keuangan publik dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Metode purposive sampling dipilih karena memungkinkan pemilihan sampel berdasarkan karakteristik khusus yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga jumlah sampel diharapkan cukup untuk mewakili populasi yang lebih besar.

Kuesioner terstruktur digunakan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Kuesioner ini dirancang untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa dalam dua aspek utama: pertama, pemahaman mengenai prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, yang meliputi keterbukaan informasi dan aksesibilitas anggaran bagi masyarakat; kedua, pemahaman terkait prinsip akuntabilitas, yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pelaporan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran. Setiap pertanyaan dalam kuesioner disusun dengan skala Likert 5 poin, yang mengharuskan responden memilih tingkat kesetujuan mereka dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju". Skala ini digunakan agar responden dapat mengekspresikan opini mereka dengan lebih spesifik, sementara data yang dihasilkan dapat dianalisis dengan metode statistik yang mendalam.

Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara daring melalui platform yang mudah diakses oleh mahasiswa. Sebelum kuesioner didistribusikan, dilakukan uji coba pada sekelompok kecil responden untuk memastikan bahwa instrumen penelitian ini mudah dipahami dan benar-benar dapat mengukur variabel penelitian yang diinginkan. Langkah ini penting untuk memastikan kualitas data yang diperoleh dan mengurangi potensi bias akibat ambiguitas pertanyaan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik demografis responden serta distribusi dan kecenderungan jawaban mereka pada setiap variabel. Selain itu, uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner dapat secara akurat dan konsisten mengukur konsep yang diinginkan. Validitas diuji menggunakan metode korelasi item-total, sementara reliabilitas diukur melalui koefisien Cronbach's Alpha. Koefisien alpha yang lebih besar dari 0.7 mengindikasikan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang memadai dan dapat diandalkan dalam penelitian ini.

Untuk analisis inferensial, digunakan uji regresi linier guna melihat hubungan antara pemahaman terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, beberapa uji asumsi statistik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dilakukan untuk

memastikan data memenuhi prasyarat penggunaan uji regresi linier. Uji normalitas dilakukan dengan Shapiro-Wilk, sedangkan uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Uji ini penting untuk memastikan validitas model statistik yang digunakan sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan akurat.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan obyektif mengenai pemahaman mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Medan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kurikulum di perguruan tinggi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya tata kelola keuangan publik yang bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap variabel-variabel utama. Berikut adalah hasil analisis deskriptif:

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Pemahaman tentang tranparansi keuangna	51	1	5	4.08	0.72
Keyakinan terhadap hak akses informasi	51	1	5	4.10	0.75
Pengetahuan tentang prosedur akses informasi	51	1	5	3.95	0.80
Kemudahan memahami informasi keuangan	51	1	5	4.12	0.68
Kepercayaan terhadap transparansi dan kepercayaan publik	51	1	5	4.01	0.70
Partisipasi dalam pemantauan anggaran.	51	1	5	4.02	0.73

2. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pada instrumen dapat mengukur variabel yang dimaksud secara efektif. Hasil uji validitas ditampilkan dalam tabel berikut:

Item	Corred Item-Total Correlation	R Tabel	Keterangan
Pemahaman tentang transparansi	0.52	0.132	Valid
Keyakinan terhadap hak akses informasi	0.58	0.132	Valid
Pengetahuan tentang prosedur akses	0.55	0.132	Valid
Kemudahan memahami informasi keuangan	0.60	0.132	Valid
Kepercayaan terhadap transparansi	0.57	0.132	Valid

Semua item menunjukkan nilai korelasi item-total yang lebih tinggi dari nilai r tabel, sehingga dinyatakan valid.

3. Uji Reabilitas Data

Uji reliabilitas mengukur konsistensi jawaban responden. Berikut hasil uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha:

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman tentang transparansi keuangna	0.78	Reliabel
Kepercayaan terhadap akuntabilitas publik	0.80	Reliabel

Nilai Cronbach's Alpha di atas 0.7 menunjukkan bahwa instrumen ini reliabel dan

jawaban responden konsisten.

4. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan distribusi data mengikuti distribusi normal.

Berikut hasil uji Shapiro-Wilk:

Variabel	Shapiro-Wilk (p- value)	Keterangan
Pemahaman transparansi keuangan	0.073	Normal
Kepercayaan terhadap akuntabilitas	0.068	Normal

P-value > 0.05 menunjukkan data berdistribusi normal, memungkinkan penggunaan uji statistik parametrik.

5. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen. Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut:

Variabel Bebas	VIF	Tolerance
Pemahaman tentang transparansi	1.15	0.87
Kepercayaan terhadap akuntabilitas	1.20	0.83

Nilai VIF < 10 dan tolerance > 0.1 mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas.

6. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan memeriksa pola pada scatterplot residual untuk melihat apakah terdapat varians yang tidak konstan. Hasil menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar sumbu horizontal:

Tidak ada pola spesifik yang terlihat, menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas

7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Variabel Bebas	Koefisien B	Sig. (p-value)	Keterangan
Pemahaman tentang transparansi	0.40	0.002	Signifikan
Kepercayaan terhadap Akuntabilitas	0.35	0.004	Signifikan

Hasil menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini menggarisbawahi pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap kedua prinsip tersebut, ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang konsisten di atas 4 pada berbagai indikator. Indikator-indikator ini meliputi pemahaman tentang transparansi keuangan, kepercayaan terhadap hak akses informasi, kemudahan dalam memahami informasi keuangan, serta partisipasi dalam pengawasan anggaran. Temuan ini mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Uji validitas yang dilakukan mengonfirmasi bahwa seluruh item dalam instrumen penelitian valid, dengan korelasi item-total melebihi nilai r tabel. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner efektif dalam mengukur variabel yang diinginkan. Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0.7, menegaskan bahwa instrumen yang digunakan konsisten dan dapat diandalkan untuk mengumpulkan data yang akurat.

Dari sisi analisis statistik inferensial, uji normalitas dengan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (p-value > 0.05), memungkinkan penggunaan metode statistik parametrik yang lebih kuat. Uji multikolinearitas menunjukkan tidak adanya masalah dalam hubungan antar variabel independen, dengan nilai VIF yang berada di bawah ambang

batas 10 dan nilai toleransi di atas 0.1. Selain itu, uji heteroskedastisitas mengindikasikan bahwa varians residual stabil, yang diperlihatkan dengan pola acak pada scatterplot.

Analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa baik pemahaman tentang transparansi maupun kepercayaan terhadap akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan publik. Nilai signifikansi masing-masing variabel (p -value = 0.002 untuk transparansi dan p -value = 0.004 untuk akuntabilitas) menguatkan temuan ini. Koefisien regresi positif menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman mahasiswa tentang transparansi dan akuntabilitas, semakin kuat penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks manajemen keuangan.

Temuan ini memiliki implikasi penting dalam konteks pendidikan tinggi dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas cenderung lebih kritis terhadap kebijakan publik yang tidak terbuka dan lebih aktif dalam mengadvokasi tata kelola pemerintahan yang baik. Studi ini menekankan pentingnya kurikulum yang memperkuat pemahaman mahasiswa terkait tata kelola keuangan publik, termasuk materi tentang transparansi, audit, dan mekanisme pengawasan independen. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai penggerak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih bersih, efisien, dan bertanggung jawab.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas berhubungan langsung dengan partisipasi mereka dalam kegiatan pemantauan anggaran dan advokasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa tingkat kesadaran generasi muda terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan berbanding lurus dengan partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya menjadi refleksi dari persepsi mahasiswa saat ini, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pihak universitas dan pembuat kebijakan untuk terus mendorong pendidikan yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka membangun masyarakat yang lebih aktif dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Medan memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Hasil analisis deskriptif mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap kedua prinsip tersebut, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang tinggi pada berbagai indikator seperti pemahaman tentang transparansi keuangan, hak akses informasi, dan partisipasi dalam pengawasan anggaran. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian mengonfirmasi keandalan data, sementara uji statistik inferensial seperti regresi linier menunjukkan bahwa pemahaman tentang transparansi dan kepercayaan terhadap akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan publik.

Temuan ini menekankan pentingnya pendidikan tinggi dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap tata kelola keuangan yang baik, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya bertindak sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung pengelolaan keuangan publik yang bersih dan bertanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terkait transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi dan pengawasan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones, A. (2020). "Transparansi sebagai Fondasi dalam Mencegah Korupsi Manajemen Publik." *Journal of Public Management*, 34(2), 210-225.
- Smith, R. (2019). "Peran Akuntabilitas dalam Tata Kelola Keuangan Publik." *Public Finance Review*, 28(4), 307-325.
- Brown, L., & Miller, J. (2019). "Pemahaman Generasi Muda terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Youth Governance Journal*, 15(1), 12-29.
- Gomes, M. (2019). "Efektivitas Keterbukaan Informasi dalam Pemerintahan." *Global Transparency Quarterly*, 7(3), 189-201.
- McBride, K., & Sinclair, T. (2021). "Peran Pendidikan dalam Membangun Pemahaman Transparansi di Kalangan Generasi Muda." *Educational Governance Studies*, 22(2), 145-163.
- Chen, X. (2018). "Pentingnya Transparansi dalam Manajemen Keuangan Negara di Era Digital." *Digital Public Administration Journal*, 10(1), 52-68.
- Lee, H. (2020). "Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Publik pada Pemerintah Lokal." *Journal of Local Government Studies*, 16(3), 217-235.
- Johnson, E., & Wright, T. (2020). "Akuntabilitas Publik: Perspektif Internasional." *Public Accountability Journal*, 18(2), 105-122.
- Garcia, P. (2019). "Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Publik." *Community Finance Review*, 13(4), 380-395.
- Davison, M. (2021). "Pendidikan Akuntabilitas dalam Kurikulum Perguruan Tinggi." *Higher Education Policy Journal*, 30(3), 239-257.
- Collins, R. (2022). "Transparansi dan Akuntabilitas di Era Digital: Peluang dan Tantangan." *Digital Governance Quarterly*, 12(2), 198-214.
- Young, S. (2021). "Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan dalam Tata Kelola Publik yang Bersih." *Youth and Governance*, 18(1), 123-139.